

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018, *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018*, BPS Provinsi DKI Jakarta, Jakarta.
- Berechman, Banister, David dan Joseph, 2000, *Transport Investment and Economic Development*, Psychology Press, London.
- Bhattacharjee, Anol, 2012, *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, Scholar Commons, University of South Florida, Florida.
- D., Moh. Mahfud M, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy*, ITS Press, Surabaya.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 1988, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta.
- PT MRT Jakarta, 2018, *Laporan Tahunan 2018: Siap Menuju Peradaban Baru*, PT MRT Jakarta, Jakarta.

- Raharjo, Satjipto, 2000, *Membangun Politik Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 2007, Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya, dalam Syamsuddin Haris (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (hlm. 3-24), LIPI Press, Jakarta.
- R., Ridwan H, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S., Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset & YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul, 2014, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## JURNAL/RISET

- Antik Bintari, "Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseoran Terbatas (PT) *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No.2, Oktober 2016,
- Ari Widayanti, et al., "Permasalahan dan Pengembangan Angkutan Umum di Kota Surabaya", *Jurnal Transportasi*, Vol. 14, No. 1, April 2014, hlm. 53-60.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, "Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan PT Kereta Api Indonesia (Persero)", *Jurnal Independent*, Vol 7, No. 2, September 2019, hlm. 215-224.

- Eko Nur Surachman & Hadi Setiawan, "Municipal Bonds as The Financing Strategy for Urban Infrastructure: Case Study of Jakarta MRT", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20 No. 3, September 2016, hlm. 369-381.
- Irwan Ibrahim, "Persiapan Teknis Pembangunan Transportasi Cepat Masal di Jakarta", *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, Desember 2010, hlm. 197-204.
- Japan International Cooperation Agency, "The study on integrated transportation master plan for Jabodetabek (phase II) final report: main report; Vol. 2. -Pre feasibility study, Maret 2004.
- Lesta Karolina B Sembayang, "Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Analisis *Granger Causality*", *Jurnal Jejak*, Vol. 4 No. 1, Maret 2011, hlm 14-22.
- Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991.
- M. Pujo Siswoyo, "Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum", *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, Vol. 10 No. 2, Juli 2008, hlm. 171-180.
- Winarno Yodho, S.H., M.A., dan Heri Tjandrasari, S.H., "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, Februari 1987, hlm. 57-63.
- Yuli Indrawati, "Menanti Lahirnya Undang-Undang Pinjaman Luar Negeri", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 31, No. 2, April 2001, hlm. 143-149.

## **SKRIPSI/TESIS**

- Anastia Prastyani, 2016, *Peran Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam Proyek Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta Tahun 2010-2015*, Skripsi (S1), Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Fitri Erna Muslikah, 2015, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Skripsi (S1), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok.
- Triasita Nur Azizah, 2017, *Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Ruang Bawah Tanah Dalam Proyek PT Mass Rapid Transit Jakarta*, Skripsi (S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

## **WAWANCARA**

Farid Rizky, Seksi Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam wawancara dengan penulis pada 12 Februari 2020 pukul 10.30 WIB.

Ghamal Peris, Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis, dalam wawancara dengan penulis pada 6 Januari 2020 pukul 14.30 WIB.

Wisnu Surianugraha, Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam wawancara dengan penulis pada 11 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.

## **SEMINAR**

Tuhiyat, “Skema Pendanaan MRT Jakarta Fase 1 dan 2”, Seminar, Fellowship Jurnalis 2019, Wisma Nusantara, Jakarta, 19 November 2019.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1002).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1003).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pentausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Proyek MRT.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Penarikan Dana Hibah bagi Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

## INTERNET

Anggi Setiani Dayana, “Perbedaan MRT, LRT, dan KRL Commuter Line”, diakses dari <https://tirto.id/perbedaan-mrt-lrt-dan-krl-commuter-line-eciA> pada 22 Oktober 2019 pukul 19.37 WIB.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “Mekanisme Penarikan Dana Hibah”, <http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/147/MEKANISME-PENARIKAN-DANA-PHLN>, diakses pada 21 Februari 2020 pukul 14.12 WIB.

Britannica, “Elevated Transit Line”, diakses dari <https://www.britannica.com/technology/elevated-transit-line> pada 22 Oktober 2019 pukul 21.10 WIB.

Britannica, “Rapid Transit”, diakses dari <https://www.britannica.com/technology/rapid-transit> pada 22 Oktober 2019 pukul 21.07 WIB.

ITDP, “BRT Planning Guide”, diakses dari <https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/why-brt/defining-rapid-transit-modes> pada 22 Oktober 2019 pukul 21.04 WIB

Kementerian Keuangan, “Konsep Pinjaman Daerah”, diakses dari [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=328](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328), pada 27 April 2020 pukul 12.33 WIB.

Merriam-Webster, “Rapid Transit”, diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/rapid%20transit> pada 22 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

PT MRT Jakarta, “Mengenal Proyek Mass Rapid Transit Jakarta”, <https://www.jakartamrt.co.id/mengenal-proyek/>, diakses pada 29 November 2019 pukul 14.43 WIB.

PT MRT Jakarta, “Pendanaan Proyek”, diakses dari <https://www.jakartamrt.co.id/mengenal-proyek/pendanaan-proyek/> pada 22 Oktober 2019 pukul 21.48 WIB.

PT MRT Jakarta, “Perkembangan Konstruksi”, diakses dari <https://www.jakartamrt.co.id/proyek-dan-perkembangan/perkembangan-konstruksi/> pada 22 Oktober 2019 pukul 21.23 WIB.

PT MRT Jakarta, “Sejarah MRT Jakarta”, diakses dari <https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/> pada 22 Oktober 2019 pukul 19.10 WIB.

Sapto Andika Candra, “MRT Jakarta akan Jadi Contoh Kota Lain di Indonesia”, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/pom9k1384/mrt-jakarta-akan-jadi-contoh-kota-lain-di-indonesia> pada 22 Oktober 2019 pukul 20.34 WIB.

Yayu Agustina Rahayu, “Pemerintah catat perbandingan pertumbuhan kendaraan & jalan raya saat ini capai 10:1”, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-catat-perbandingan-pertumbuhan-kendaraan-jalan-raya-saat-ini-capai-101.html> pada 28 April 2020 pukul 16.17 WIB.